

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Pemandian Alam Tamborasi Kabupaten Kolaka

Laila Dhiza Amalia¹; Sartono²; Tanzil³; Marlina Rajab⁴

^{1,2,3,4} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; lailadhiza14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan wisata pemandian alam Tamborasi di Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni dengan menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan pariwisata masyarakat di pemandian alam Tamborasi. Faktor yang mendukung dalam pemandian alam Tamborasi yakni panorama yang indah, sejuk, dan masih asli menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi wisata tersebut, kondisi keamanan yang baik dan memiliki keunikan dengan sungai terpendek di dunia yang berada di antara hutan gunung dan pantai, sedangkan faktor penghambat di pemandian alam Tamborasi yakni terbatasnya sarana dan prasarana objek wisata alam, kurangnya transportasi untuk mencapai tiap objek wisata, serta kurangnya promosi objek wisata alam Tamborasi.

Kata kunci : *Berbasis Masyarakat, Community Based Tourism, Pengembangan Pariwisata.*

ABSTRACT

This study aims to determine how the development of community-based tourism in an effort to improve Tamborasi natural baths in Kolaka Regency. The research method used in the study is to use a qualitative type. The results of this study indicate that there are supporting factors and inhibiting factors for community tourism development in Tamborasi natural baths. Supporting factors in Tamborasi natural baths are beautiful, cool, and pristine panoramas that become an attraction for tourists to visit these tours, good security conditions and have the uniqueness of the shortest river in the world between mountain forests and beaches, while inhibiting factors in tamborasi natural baths are limited facilities and infrastructure for natural attractions, lack of transportation to reach each tourist attraction, and lack of promotion of Tamborasi natural attractions.

Keywords : *Community-based, Community Based Tourism, Tourism Development.*

Pendahuluan

Mengingat pesatnya pertumbuhan Indonesia dan dunia di sektor pariwisata, negara kepulauan Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dengan proporsi yang sangat besar. Pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya mempengaruhi keuntungan devisa negara, tetapi juga meningkatkan prospek bisnis, memberikan peluang baru bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dan mengurangi pengangguran di daerah tersebut. (Rahma, 2013).

Anugrah Pesona Indonesia (API) 2020. Anugrah Pesona Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI). Acara ini memiliki delapan kategori: Atraksi Budaya, Desa Adat, Destinasi Kreatif, Destinasi Baru, Tempat Bersejarah, Festival Pariwisata, Destinasi Unik, dan Surga Tersembunyi. Dianggap sebagai sungai terpendek di dunia dengan panjang hanya 20 meter dan lebar 15 meter, destinasi ini masuk dalam kategori destinasi wisata unik bersama sembilan destinasi wisata unik di wilayah Indonesia lainnya. Untuk membantu Sungai Tamborasi menjadi destinasi wisata yang unik, Dinas Pariwisata Kolaka mulai menggalakkan hal tersebut kepada masyarakat setempat agar masyarakat Sultra, khususnya Kabupaten Kolaka, dapat ikut mendukung wisata sungai tamborasi.

Keberhasilan pengembangan pariwisata memerlukan pemahaman motivasi yang baik. Tentu saja, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat, sekaligus mengurangi biaya sosial dan ekonomi serta meminimalkan dampak lingkungan. Pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan obyek wisata pada masyarakat belum berhasil. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tidak memberikan pendidikan atau pelatihan mengenai pengelolaan tempat wisata kepada masyarakat, masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting. Dalam rangka mendukung pertumbuhan pariwisata, maka kegiatan dan program pengembangan yang dilaksanakan mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan potensi kedudukan dan fungsi pemerintah kota sebagai pelaku industri pariwisata. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penyelenggaraan pariwisata berbasis masyarakat didasarkan pada pengakuan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, kemudian dikelola berdasarkan prinsip demokrasi sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mentransformasikan pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan masyarakat yang sesungguhnya, membela dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan dalam segala aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan keterampilan dan kemandirian suatu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup penguatan individu tetapi juga penguatan institusi social

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut

menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004). Pada hakikatnya pariwisata berbasis masyarakat merupakan strategi pengembangan pariwisata yang berfokus pada kelompok lokal yang terkait langsung dan tidak langsung dengan sektor pariwisata. Selain itu, kelompok masyarakat akan memiliki akses terhadap pengelolaan pariwisata dan sistem pengembangan yang mendukung cara hidup yang lebih demokratis dan pemerataan manfaat ekonomi pariwisata di antara masyarakat lokal.

Setiap kota harus didorong untuk menetapkan tujuannya sendiri dan menyesuaikan pariwisata untuk memenuhi persyaratan tersebut. Perencanaan yang memasukkan faktor sosial dan lingkungan juga diperlukan, dalam sektor pariwisata harus memperhatikan baik wisatawan maupun penduduk setempat. Dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan CBT di desa wisata yang akan mendorong inovasi dan produksi wisata. Jika kegiatan pembangunan pedesaan dilakukan secara berkelanjutan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru serta meningkatkan kapasitas masyarakat yang sejalan dengan pembangunan.

Community-Based Tourism (CBT) telah menarik perhatian luas sebagai pendekatan untuk mencapai pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, CBT menawarkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang secara bersamaan mendorong kesejahteraan komunitas (Tasci et al., 2014). Namun, kesuksesan CBT sangat tergantung pada partisipasi komunitas lokal dan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Di beberapa wilayah, seperti Laos, kurangnya partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan tantangan utama. Penelitian menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah dan pelatihan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Kim et al., 2014). Di Indonesia, penelitian tentang pemetaan potensi pariwisata desa telah membantu mengidentifikasi peluang dan hambatan untuk CBT, yang esensial untuk pengembangan yang berkelanjutan (Sugiarto et al., 2020).

Persepsi dan sikap masyarakat juga mempengaruhi penerimaan terhadap inisiatif pariwisata. Masyarakat yang merasa memiliki kontrol dan terlibat dalam pengembangan destinasi umumnya memiliki sikap yang lebih positif terhadap pariwisata, yang berdampak pada faktor lingkungan dan sosial (Lo et al., 2014). Oleh karena itu, membangun hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat, serta menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan, menjadi kunci untuk memperkuat partisipasi masyarakat (Eyisi et al., 2020).

Dari sudut pandang manajemen destinasi, praktik pengelolaan yang baik terbukti meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Di Bali, pendekatan pengelolaan yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat (Widiati et al., 2018). Sementara itu, analisis SWOT yang dilakukan di Tetebatu, Lombok, menunjukkan pentingnya strategi yang terstruktur untuk menghadapi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam CBT (Rojabi et al., 2023).

Menurut Sarbaitinil (2019), mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya mendukung aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas hidup dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam mengimplementasikan CBT yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Meskipun *Community-Based Tourism* (CBT) telah banyak diteliti, penelitian penulis mengidentifikasi celah khusus dalam literatur yang ada, yaitu kurangnya fokus pada dinamika internal masyarakat lokal dan interaksi spesifik antara pemangku kepentingan dalam konteks pemandian alam Tamborasi di Kabupaten Kolaka. Kebanyakan studi sebelumnya berfokus pada faktor-faktor umum yang mendukung atau menghambat CBT tanpa mengeksplorasi secara mendalam peran spesifik pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya alam yang ada. Selain itu, penelitian ini berusaha memahami bagaimana kebijakan lokal dapat diselaraskan dengan kepentingan komunitas untuk mempromosikan pariwisata yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga bermanfaat secara sosial dan lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan secara rinci faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Tamborasi, serta mengevaluasi efektivitas kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting pada literatur yang ada dengan mengembangkan model pengelolaan CBT yang dapat diadaptasi untuk daerah lain dengan karakteristik serupa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang bukan hanya teoretis tetapi juga praktis untuk pemerintah lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pariwisata berbasis masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan sampai selesai dan berlokasi di desa yang berada di bagian ujung utara Kolaka tepatnya di Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian tersebut karena adanya suatu permasalahan yang terjadi dalam pengembangan wisata alam Tamborasi sehingga menarik peneliti. Dalam Upaya Peningkatan Wisata Pemandian Alam Tamborasi di Kabupaten Kolaka, Maka subjek dalam penelitian ini adalah upaya partisipasi masyarakat dalam pengembangan atau peningkatan wisata pemandian alam Tamborasi. Penentuan informan (narasumber) dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian ini. Adapun informan penelitian terdiri dari Kepala dinas pariwisata/bidang destinasi dan industri pariwisata, Pihak pengelola wisata pemandian alam Tamborasi, Tokoh/masyarakat lokal Iwoimendaa, dan Wisatawan. Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif oleh Miles & Huberman yang menyebutkan terdapat 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sudirman et al, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Pemandian Alam Tamborasi Kabupaten Kolaka

Pemberdayaan pada hakikatnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dan sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah proses pembangunan serta pembangunan yang berpusat pada manusia yang menumbuhkan keterlibatan masyarakat yang berawal dari bawah.

Pada penelitian terkait Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Pemandian Alam Tamborasi Kabupaten Kolaka, penulis akan membahas terkait pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat unsur adanya dukungan pemerintah, partisipasi dari *stakeholder*, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan, dan penguatan institusi lokal. Penulis akan membahas sesuai dengan hasil penelitian dan observasi di lapangan dalam pemaparan berikut:

1. Adanya Dukungan Pemerintah

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah daerah perlu berperan sebagai motivator agar usaha pariwisata tetap dapat berjalan tidak hanya pengusaha di bidang pariwisata, investor dan masyarakat umum juga menjadi kelompok sasaran utama dan harus terus dipacu agar pengembangan pariwisata berhasil. Pemerintah juga akan menyediakan segala fasilitas untuk mendukung seluruh program pariwisata setempat. Dengan kata lain, pemerintah sebagai perantara mempunyai peran dalam memfasilitasi seluruh kegiatan dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola potensi pariwisata yang berkembang, dan dalam praktiknya pemerintah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

"Wisata pemandian alam tamborasi selalu mendapat dukungan dari pemerintah, baik itu dalam bentuk pengawasan, motivasi, ataupun penganggaran. Sektor pariwisata juga tidak akan berkembang tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, seperti halnya dengan sungai tamborasi yang selalu mendapatkan fasilitas dan penerima PAD dari pemerintah dinas pariwisata". (Wawancara, 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Kabid Destinasi Dan Industri Pariwisata, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah selalu mendukung pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi baik itu fasilitas, pengawasan, maupun penganggaran, sektor pariwisata tidak dapat berkembang apabila tidak adanya bantuan dari pemerintah.

"pemerintah mendukung adanya pengembangan wisata ini dimana DISPAR selalu menyalurkan anggaran untuk memperbaiki atau menambah fasilitas disini tidak hanya itu DISPAR juga selalu memberikan masukan dan motivasi dalam pengembangan obyek wisata tamborasi kepada para pegawai". (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara ketua pihak pengelola, peneliti bahwa Dinas Pariwisata selalu mendukung pengembangan obyek wisata tamborasi dengan menyalurkan dana anggaran dan juga memberikan motivasi dan masukan kepada para pegawai wisata tamborasi.

"Saya cukup puas dengan dukungan pemerintah, dan saya juga berharap pihak dinas pariwisata lebih memperhatikan pembangunan obyek wisata tamborasi terutama dalam segi fasilitas". (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara kepada pihak masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan wisata tamborasi akan tetapi

masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan fasilitas yang dimana hal itu adalah akses menuju lokasi wisata tamborasi.

“Kami puas dengan apa yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata untuk mengembangkan tamborasi dengan memfasilitasi, mendukung, dan lain sebagainya.”

Dari hasil wawancara kepada pihak masyarakat tamborasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka puas dengan adanya dukungan dari pemerintah mulai dari memfasilitasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait adanya dukungan dari pemerintah pada proses pengembangan wisata pemandian alam tamborasi berjalan dengan baik di mana perkembangan wisata ini didukung oleh pemerintahan dengan menyalurkan anggaran kepada pihak pengelola untuk memperbaiki atau menambah fasilitas, pemerintah juga memberikan masukan dan motivasi kepada pihak pegawai wisata tamborasi adapun dari pihak masyarakat bahwa mereka juga puas akan dukungan pemerintah akan tetapi harus lebih memperhatikan lagi akses jalan menuju lokasi wisata tamborasi.

2. Partisipasi dari stakeholder

Stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata (Handayani & Warsono, 2017). Lebih lanjut menurut Hertifah (2003) (Elista et al., 2020), pemangku kepentingan adalah individu atau gabungan orang atau lembaga yang mempunyai legitimasi untuk membangun suatu program bersama. Terkait pengembangan pariwisata, salah satu tugas pemangku kepentingan adalah mengembangkan kebijakan dan rencana sistematis yang. Berkaitan dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata.

“Kami selalu berpartisipasi bersama masyarakat dengan cara membimbing dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka terhadap pengelolaan obyek wisata” (Wawancara 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Destinasi Dan Industri Pariwisata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah selalu berpartisipasi dalam mengembangkan obyek pariwisata pemandian alam tamborasi dan melakukan dorongan untuk meningkatkan partisipasi mereka terhadap pengelolaan wisata tamborasi.

“Biasanya pemerintah DISPAR selalu turut andil dalam melakukan partisipasi terhadap pengembangan obyek wisata ini”. (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ketua pihak pengelola peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah selalu berpartisipasi dalam setiap pengelolaan pengembangan wisata tamborasi.

“Dinas Pariwisata pernah berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan memberi support untuk mendukung wisata tamborasi”. (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah pernah berpartisipasi dalam hal sosialisasi dengan masyarakat dan memberi dukungan atas wisata tamborasi.

“Kami turut senang dengan ikut sertanya pemerintah dalam pengembangan wisata tamborasi sehingga desa kami terkenal akan hal itu”. (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tamborasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat senang dengan adanya partisipasi dari pemerintahan dalam mendukung pengembangan wisata Tamborasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait partisipasi dari *stakeholder* pada proses pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi, yaitu pemerintah selalu berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelayanan pengembangan wisata tamborasi mulai dari penganggaran fasilitas, dukungan dan juga sosialisasi terhadap masyarakat tamborasi. Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mengelola wisata tamborasi.

3. Pembagian Keuntungan yang Adil

Keuntungan dari pariwisata adalah masyarakat mendapatkan keuntungan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dicapai melalui kegiatan pariwisata yang lebih luas, termasuk dalam bentuk proyek pembangunan yang dibiayai dari pendapatan pariwisata. Pada tahap pengembangan pariwisata saat ini, masyarakat lokal menciptakan manfaat yang ideal bagi daerah sekitarnya.

Para pekerja masing-masing mendapat untung melalui aktivitasnya sebagai pemandu wisata, perahu wisata, bahkan pengelola tempat parkir. Masyarakat lokal telah berkontribusi dalam pengelolaan pariwisata, namun manfaatnya belum sama. Hal ini tidak hanya menyangkut manfaat langsung yang dinikmati oleh mereka yang menjalankan usaha di sektor pariwisata, namun juga manfaat tidak langsung yang dinikmati oleh mereka yang tidak menjalankan usaha. Manfaat tidak langsung yang diterima masyarakat lokal dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas, termasuk dalam bentuk proyek pembangunan yang dapat dibiayai dari pendapatan pariwisata.

Dinas Pariwisata Kab. Kolaka mendorong agar bantuan, baik dalam bentuk dana maupun pendampingan literasi keuangan, difokuskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, dan peningkatan destinasi wisata sehingga kunjungan wisatawan menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan, Melalui bantuan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan untuk pengembangan desa wisata serta dapat berkontribusi dengan meningkatnya jumlah wisatawan.

"Wisatawan yang datang ke pemandian alam tamborasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dalam setiap tahunnya itu hampir mencapai kurang lebih 40 juta yang sangat berperan dalam peningkatan pendapatan daerah dan juga kepada pengelola serta masyarakat tamborasi, kami selalu membagi pendapatan kami kepada mereka dan proses pengelolanya kita selalu memilih masyarakat secara langsung untuk pengelola pendapatan retribusi". (Wawancara 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa obyek pariwisata pemandian alam tamborasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, mereka selalu memilih masyarakat secara langsung untuk pengelola pendapatan retribusi, hal tersebut membuat pemerintah Dinas Pariwisata membagi keuntungan dengan pihak pengelola dan juga masyarakat tamborasi.

"Selama ini kami menjadi pengelola disini alhamdulillah masyarakat hidup sesuai dengan aturan yang ada, selain masyarakat yang kami berdayakan untuk melakukan penjualan di wisata tamborasi kami juga memberdayakan masyarakat luar. Contoh misalnya ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya itu setiap bulannya kami pihak tamborasi mengeluarkan dana untuk disedekahkan kepada masyarakat tamborasi dan kami juga mempunyai 4 mesjid di area tamborasi yang setiap bulannya kami penuh dan tidak lupa juga dengan pemerintahan desa tamborasi walaupun secara

langsung DISPAR, kami selalu memberikan sesuai haknya dan porsinya serta tidak lupa dengan pihak keamanan". (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ketua pihak pengelola wisata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama mereka menjadi pengelola, mereka selalu mengeluarkan dana dari hasil keuntungan yang didapat dan diberikan kepada masyarakat yang tidak diberdayakan tak lupa juga dengan mesjid-mesjid yang berada di desa tamborasi, pemerintah desa tamborasi dan juga pihak keamanan setiap bulannya, pihak pengelola selalu memberikan sesuai dengan hak dan jua porsinya.

"Saya pernah mendapatkan dana tersebut, walau tak seberapa alhamdulillah saya sangat bersyukur telah menerima bantuan dari pengelola wisata" (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat bersyukur menerima bantuan dari pengelola wisata walau tak seberapa.

"Saya baru tahu itu sepertinya saya tidak mendapatkan dana dari pengelolaan wisata tamborasi karena baru mengetahuinya" (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat tamborasi, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak menerima dana dari hasil pengelolaan wisata tamborasi dan baru mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait pembagian keuntungan yang adil pada proses pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi, yaitu pemerintah Dinas Pariwisata selalu membagi keuntungan dengan pihak pengelola wisata, sedangkan pihak pengelola wisata juga memberikan keuntungan kepada masyarakat, pemerintah desa tamborasi, dan juga pihak keamanan walaupun ada sebagian kecil masyarakat tidak tahu akan hal tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan tersebut.

4. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan suatu cara pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi potensinya di masa depan. Tujuan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa semua generasi mendatang dapat memperoleh manfaat dari kekayaan potensi sumber daya alam negaranya. Selain itu, seluruh masyarakat dapat belajar bagaimana mengelola sumber daya alamnya untuk generasi mendatang.

Pariwisata berkelanjutan berfokus pada keberlanjutan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai komponen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata harus mampu memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan yang artinya kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung oleh kolaborasi lokal pada tahap perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan, sehingga tercapai pemerataan manfaat. Dalam melaksanakan kegiatan pariwisata, perlu dipastikan bahwa sumber daya alam dan buatan manusia dilestarikan dan ditingkatkan sesuai dengan norma dan standar internasional.

"Kami selalu membantu dan memberitahukan peraturan-peraturan yang harus di terapkan pada para pedagang dan juga pengelola penginapan di sekitar wisata tamborasi dan juga menyuruh para pedagang selalu merapikan serta membersihkan di sekitar itu agar enak dipandang oleh para wisatawan yang datang". (Wawancara 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Kabid Destinasi Dan Indrusti Pariwisata, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata selalu memberikan dukungannya terhadap para

pedagang dan pengelola penginapan dengan memberikan peraturan-peraturan dan juga menyuruh mereka selalu membersihkan lokasi perdagangan agar enak dipandang oleh para wisatawan yang datang.

"Melihat begitu banyak persaingan obyek wisata kab.Kolaka baik pribadi maupun langsung dari DISPAR, jadi persoalan wisata tamborasi masih terlihat baik-baik saja tidak ada persaingan ketat karena hal ini kami mendapatkan pengunjung yang dulu sampai sekarang tidak beda jauh sedangkan dampak negatifnya itu tidak bahkan keluhan-keluhan dari para pedagang maupun pengelola penginapan itu alhamdulillah tidak ada hanya kami selalu mengarahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan saja". (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ketua pihak pengelola wisata, penulis dapat menyimpulkan bahwa melihat begitu banyak persaingan obyek wisata di Kab. Kolaka tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus mengembangkan obyek wisata tamborasi hal ini membuat mereka mendapatkan wisatawan yang dari dulu sampai sekarang terus berdatangan bahkan tidak adanya keluhan yang di dapatkan dari para pedagang dan pengelola penginapan mereka hanya mengarahkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

"Kami masih mempertahankan dan memperkenalkan budaya kami kepada wisatawan dan ini yang sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi kami". (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara kepada masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tamborasi masih mempertahankan dan memperkenalkan budaya mereka kepada wisatawan yang datang berkunjung di obyek wisata tamborasi.

"Saya sangat menerima kunjungan wisatawan mungkin juga masyarakat lainnya seperti itu saya tidak tahu pasti, biasanya itu pihak pengelola tamborasi mengadakan pertunjukkan kepada wisatawan asing yang datang berkunjung ke tamborasi". (Wawancara 16 Januari)

Dari hasil wawancara kepada masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat menerima kunjungan wisatawan ke wisata tamborasi bahkan pihak pengelola biasanya membuat pertunjukan budaya kepada wisatawan asing yang datang berkunjung ke tamborasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan pada proses pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi bahwa Dinas Pariwisata dan juga pihak pengelola selalu mengarahkan para pedagang dan pengelola penginapan agar selalu mengikuti peraturan yang ada dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman saat berkunjung serta begitu banyaknya persaingan wisata yang ada di Kab. Kolaka, Dinas Pariwisata dan juga pihak pengelola selalu memperkenalkan budaya-budaya lokal kepada wisatawan asing hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dan menambah perekonomian mereka.

5. Penguatan Institusi Lokal

Dengan mempertimbangkan dimensi lokal dalam suatu komunitas (termasuk institusi lokal) dalam konteks proses pengembangan komunitas, maka kedudukan masing-masing dimensi lokal dalam mencapai tujuan pengembangan komunitas dapat dijelaskan. Memahami aspek lokal masyarakat sangat penting dalam pekerjaan sosial karena mempengaruhi tindakan yang diambil dalam proses intervensi dalam pendekatan pengembangan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Botd sebuahvan Rensburg (2000) serta Eversol (2012) menggambarkan partisipasi sebagai proses yang kompleks sehingga membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan berbagai aspek internal masyarakat maupun eksternal

serta mengintegrasikannya bersama pengetahuan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi. Dalam implementasinya, hasil kajian Marfo (2008) menguraikan tentang pentingnya pelembagaan partisipasi serta sensitivitas untuk membuka bagi partisipasi masyarakat, serta permulaan untuk akomodasi dinamika antar berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam proses pengembangan masyarakat. Namun kajian ini tidak banyak menjelaskan aspek-aspek lainnya sebuah dalam proses pengembangan masyarakat.

“Pemerintah Dinas Pariwisata berkolaborasi atau menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar agar kami bisa mengembangkan atau memfasilitasi obyek wisata tersebut, yaitu dengan cara membimbing dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mengelola obyek wisata. Menurut kami memberikan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan juga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan obyek wisata tersebut cukup baik karena ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat. (Wawancara 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Kabid Destinasi Dan Indrusti Pariwisata, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola obyek wisata tamborasi karena hal ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Persoalan partisipasi masyarakat itu kami selalu mengadakan yang namanya jumat bersih, semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata itu terikat dalam hal tersebut”. (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ketua pihak pengelola wisata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pengelola selalu mengadakan jumat bersih kepada semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata tamborasi.

“Menurut saya, peran masyarakat cukup penting dalam mengembangkan potensi wisata ini misalnya dalam hal gotong royong”. (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara kepada masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan wisata tamborasi dengan cara gotong royong.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam wisata ini sebab kami bisa tahu apa saja yang kami bisa bantu dan kami juga dapat belajar dari hal tersebut”. (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka bisa membantu dan belajar dari berpartisipasi dalam pengembangan wisata Tamborasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait penguatan institusi lokal pada proses pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi bahwa Dinas Pariwisata berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan cara melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan objek wisata tersebut yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Selain itu pihak pengelola juga selalu mengadakan Jumat bersih kepada semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata tamborasi serta masyarakat bisa membantu dan belajar dari berpartisipasi dalam pengembangan wisata Tamborasi.

6. Keterkaitan Antara Level Regional dan Nasional

Komunitas lokal seringkali tidak memiliki koneksi langsung ke pasar nasional dan internasional. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa manfaat ekowisata tidak

disadari di tingkat masyarakat. Perantara adalah orang-orang yang menghubungkan kegiatan ekowisata dengan masyarakat lokal dan justru membawa manfaat lebih bagi wisatawan.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan wilayah yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Peran tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam penerimaan devisa Negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara, nilai tambah PDRB, dan penyerapan tenaga kerja. karena dampaknya yang diberikan terhadap kehidupan perekonomian di tempat yang dikunjungi wisatawan sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008)

"Dinas Pariwisata biasanya melakukan kolaborasi kepada pihak pengelola atau BUMDES untuk peningkatan wisata tamborasi kami selalu bekerja sama jika terdapat wisatawan asing atau pihak-pihak dari luar yang datang berkunjung ke wisata tamborasi". (Wawancara 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Kabid Destinasi Dan Indrusti Pariwisata, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata bahwa melakukan kolaborasi bersama pihak pengelolaan wisata tamborasi dan BUMDES jika terdapat wisatawan asing atau pihak dari luar yang datang berkunjung ke tamborasi.

"Kalau wisatawan mancanegara kemarin saya sudah 2x menerima pertukaran pemuda mancanegara dari Jerman, Portugis, dan India. Tanggapan masyarakat mengenai wisatawan tamborasi yang perlu dibenahi atau yang perlu diperhatikan adalah daya saing bahasa karena kami masih minim dengan bahasa Inggris, jadi hari ini dan kedepannya saya sebagai pihak pengelola akan mengadakan sekolah tentang persoalan bahasa Inggris adapun wisatawan lokal mengenai tanggapan masyarakat bahwa wisatawan lokal datang melihat apakah ketersediaan tamborasi itu lengkap mulai dari kuliner sampai Cinderamata, jadi tanggapan masyarakat tentang semuanya itu positif". (Wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ketua pengelola wisata tamborasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka pernah menerima pertukaran pemuda dari mancanegara hal ini membuat mereka khawatir karena belum bisa menguasai bahasa Inggris, harapan pihak pengelola adalah mengadakan sekolah tentang persoalan bahasa Inggris dan juga ketersediaan kelengkapan wisata tamborasi mulai dari kuliner sampai candramata.

"Tanggapan saya tentang adanya kunjungan wisatawan asing adalah baik karena bisa meningkatkan perekonomian dan juga wisata tamborasi dikenal di mancanegara" (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tamborasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanggapan masyarakat sangat positif akan kunjungan wisatawan asing agar wisata tamborasi dikenal di mancanegara.

"Tanggapannya cukup baik, karena hal ini juga berdampak kepada masyarakat sekitar misalnya masyarakat pengelola dapat menyewakan fasilitas yang ada kepada pengunjung wisata asing maupun lokal". (Wawancara 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanggapan masyarakat cukup baik sebab berdampak kepada masyarakat sekitar sehingga pihak pengelola dapat menyewakan fasilitas yang ada kepada pengunjung wisata asing maupun lokal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait keterkaitan antara level regional dan nasional pada proses pengembangan pariwisata pemandian alam tamborasi bahwa Dinas Pariwisata melakukan kolaborasi bersama pihak pengelola wisata tamborasi dan BUMDES jika terdapat wisatawan asing atau pihak dari luar yang datang berkunjung ke wisata tamborasi, pihak pengelola juga pernah menerima pertukaran pemuda dari mancanegara hal ini membuat mereka khawatir karena belum bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik harapan mereka adalah mengadakan sekolah tentang persoalan ini dan juga ketersediaan kelengkapan wisata tamborasi mulai dari kuliner sampai Candra mata bahkan tanggapan masyarakat tamborasi ini cukup baik sebab dengan kunjungan wisatawan asing, wisata Tamborasi dikenal di mancanegara.

Kesimpulan

Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor dan masyarakat, kata pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Adanya dukungan dari pemerintah pada proses pengembangan wisata pemandian alam tamborasi berjalan dengan baik di mana pihak pengelola dan masyarakat tamborasi selalu didukung oleh pemerintah dan hal penganggaran dan motivasi untuk meningkatkan pengembangan objek pariwisata pemandian alam tamborasi. Manfaat dari adanya pariwisata adalah masyarakat dapat menerima keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperoleh dari kegiatan pariwisata jauh lebih luas diantaranya berupa proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari pendapatan pariwisata. Pemerintah dinas Pariwisata selalu memberikan keuntungan dengan pihak pengelola, sedangkan pihak pengelola wisata juga memberikan keuntungan kepada masyarakat tamborasi, pemerintah desa tamborasi dan juga pihak keamanan walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut.

Sungai tamborasi memiliki faktor pendukung pengembangan pariwisata, yaitu sungai tamborasi yang sangat indah memiliki sungai terbilang sangat pendek bahkan arus sungainya langsung ke laut yang tidak dimiliki oleh wisata lain para wisatawan tahu akan hal tersebut melalui media sosial dan melihat langsung ke desa wisata tamborasi dan juga keterbukaan masyarakat tamborasi di sekitar destinasi wisata merupakan salah satu tolak ukur untuk memajukan pariwisata kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keramahan dan keterbukaan terhadap wisatawan merupakan hal yang utama dalam memajukan pariwisata. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu sebagian masyarakat tamborasi masih kurang dalam pengembangan wisata tamborasi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pariwisata dan juga kurangnya partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam wisata tamborasi, peningkatan dalam fasilitas sarana dan prasarana, perlu adanya promosi wisata tamborasi dan mengajak lebih banyak wisatawan yang berkunjung serta kurangnya tenaga kerja profesional untuk mengelola objek wisata alam yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata minimnya pengetahuan bahasa Inggris oleh para pekerja saat

menghadapi wisatawan asing, pelayanan yang perlu diperbaiki, menambah para penjaga di area sekitar sungai, dan juga para tenaga kerja diharapkan lebih tahu tentang pariwisata agar dapat melakukan promosi yang bisa menarik perhatian wisatawan dan juga berdampak pada perekonomian.

Referensi

- Afrizal, T., & Jamal, A. (2022). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Nagam Raya. *Jurnal Society*, 2(2), 85-95.
- Alif. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan desa wisata (Studi di Desa Wisata Namu, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan). *Public Administration and Government Journal*, 1(2), 271-279.
- Apeprisman, Irfan Maulana, Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2020). Peran institusi lokal dalam masyarakat: Kasus Punggawa Ratu Pasundan dalam program Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pekerja Sosial*, 6(2), 154-272.
- Eyisi, A., Lee, D., & Trees, K. (2020). Facilitating collaboration and community participation in tourism development: The case of south-eastern Nigeria. *Tourism and Hospitality Research*, 21(3), 275-288. <https://doi.org/10.1177/1467358420966035>
- Kim, S., Park, E., & Phandanouvong, T. (2014). Barriers to local residents' participation in community-based tourism: Lessons from Houay Kaeng Village in Laos. *SHS Web of Conferences*, 12, 01045. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201045>
- Lo, M., Ramayah, T., & Hui, H. (2014). Rural communities perceptions and attitudes towards environment tourism development. *Journal of Sustainable Development*, 7(4). <https://doi.org/10.5539/jsd.v7n4p84>
- Masriana. (2019). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community based tourism) di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Pantiyasa, I. W. (2011). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community based tourism) dalam pemberdayaan masyarakat (Studi kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1(2).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Rojabi, S., Budiatiningsih, M., & Pratama, A. (2023). SWOT analysis of sustainable tourism development in Tetebatu, East Lombok. *Intour*, 2(1), 22-26. <https://doi.org/10.29303/intour.v2i1.716>
- Sarbaitinil, S. (2019). Development of tourism based on empowerment of community in Mandeh tourism area of Pesisir Selatan West Sumatra. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 8(2), 60-70. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v8i2.4167>
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 114-132. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>
- Sugiarto, M., Sofyan, H., Jayadianti, H., & Wibowo, R. (2020). Mapping of village tourism potential in the framework of implementing community-based tourism. <https://doi.org/10.31098/pss.v1i1.199>
- Tasci, A., Croes, R., & Villanueva, J. (2014). Rise and fall of community-based tourism – Facilitators, inhibitors and outcomes. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 6(3), 261-276. <https://doi.org/10.1108/whatt-03-2014-0012>
- Widiati, I., Suryani, L., & Wirawan, K. (2018). Tourism destination management in creating the local community welfare. <https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.14>

Yuniarti, S., Harnina, R., & Trianita, L. D. (2022). Sinergi pemerintahan Kabupaten Kolaka dan badan usaha milik desa dalam mempromosikan wisata Sungai Tamborasi. *Public Administration and Government Journal*, 2(1), 127-140.